

PISTEMIC MODERATION: SINTESIS RASIONALITAS DAN WASATHIYAH DALAM DIALOG LINTAS IMAN ERA POST-TRUTH

Rendy S. Sambara¹
rendisambara419@gmail.com

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

Abstract: The post-truth era marks a major shift in how society understands and assesses truth. Objective facts are often pushed aside by opinion and emotion, resulting in a serious degradation of public rationality. This condition has a direct impact on the practice of interfaith dialogue, which is increasingly vulnerable to polarization, misperception, and loss of ethical orientation. This study aims to examine Epistemic Moderation as a synthesis of rationality and the principles of Islamic wasathiyah in reconstructing a more civilized interfaith dialogue. Using a qualitative descriptive approach through literature review with theoretical analysis that integrates the ideas of Habermas's Communicative Rationality, Rawls's Overlapping Consensus, MacIntyre's Traditional Rationality, and the value of balance in wasathiyah. The results show that Epistemic Moderation demands an integration of reason, morality, and spirituality in weighing truth, thereby building epistemic justice and strengthening critical literacy across faiths.

Keywords: Epistemic Moderation, Interfaith Dialogue, Post-Truth Era

Abstrak: Era post-truth menandai pergeseran besar dalam cara masyarakat memahami dan menilai kebenaran. Fakta objektif kerap tersisih oleh opini dan emosi, sehingga rasionalitas publik mengalami degradasi yang serius. Kondisi ini berdampak langsung pada praktik dialog lintas iman yang semakin rentan terhadap polarisasi, mispersepsi, dan kehilangan orientasi etis. Penelitian ini bertujuan mengkaji Epistemic Moderation sebagai sintesis antara rasionalitas dan prinsip wasathiyah Islam dalam merekonstruksi dialog antaragama yang lebih berkeadaban. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis teoritis yang mengintegrasikan gagasan Rasionalitas Komunikatif Habermas, Overlapping Consensus Rawls, Rasionalitas Tradisional MacIntyre, serta nilai keseimbangan dalam wasathiyah. Hasilnya menunjukkan bahwa Epistemic Moderation menuntut keterpaduan antara rasio, moralitas, dan spiritualitas dalam menimbang kebenaran, sehingga mampu membangun keadilan epistemik dan memperkuat literasi kritis lintas iman.

Kata Kunci: Epistemic Moderation, Dialog Lintas Iman, Era Post-Truth.

PENDAHULUAN

Era *post-truth* ditandai dengan dominasi opini dan emosi lebih berkuasa dibandingkan kebenaran faktual. Fenomena ini perlahan mengikis nalar publik dan memperdalam polarisasi keagamaan di tengah masyarakat.¹ Dalam ranah sosial-keagamaan, gejalanya tampak jelas, cara berpikir dan berinteraksi umat beragama mengalami pergeseran. Narasi keagamaan kini kerap diproduksi serta disebarluaskan bukan atas dasar argumentasi ilmiah, melainkan karena kekuatan emosional dan loyalitas terhadap kelompok tertentu.² Akibatnya, ruang dialog lintas iman yang seharusnya menjadi wadah pertukaran gagasan berubah menjadi ajang perdebatan destruktif terutama di ruang digital, di mana batas antara refleksi dan provokasi semakin kabur.

Fenomena ini bukanlah sekadar asumsi, melainkan telah terbukti melalui berbagai temuan empiris. Hasil riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama *Monash Data & Democracy Research Hub* (MDDRH) mengungkap bahwa sekitar 18,15% konten video politik di lima provinsi penyelenggara Pilkada 2024 memuat ujaran kebencian berbasis agama.³ Fakta ini menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi medan yang rawan bagi penyebaran narasi intoleran dan provokatif. Jika tidak dikendalikan, arus informasi semacam ini berpotensi merusak tatanan sosial serta mengikis nilai-nilai toleransi dan keadaban publik yang selama ini menjadi fondasi kohesi masyarakat Indonesia.

Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 mengungkapkan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan *Implicit Association Test* (IAT), tercatat 63,07% guru di Indonesia memiliki kecenderungan opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Sementara itu, hasil kuesioner eksplisit menunjukkan angka 56,90% dengan pola intoleransi serupa. Data ini mengisyaratkan bahwa kalangan pendidik yang semestinya

¹Badrul Munir Chair and Zainul Adzfar, “Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah,” *Fikrah* 9, no. 2 (2021): 265, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.12596>.

²Haqqul Yaqin, “Keimanan Rasional Dan Genius Spiritual: Upaya Mencari Titik Temu Kredo Agama Dan Sains,” *Maarif* 15, no. 1 (2020): 153–67, <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.82>.

³Yaqin.

menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi masih bergulat dengan bias kognitif dan emosional dalam memandang keragaman keyakinan. Situasi ini menegaskan bahwa upaya membangun cara pandang yang terbuka, rasional, dan inklusif di dunia pendidikan masih menghadapi tantangan mendasar pada level kesadaran epistemik para pendidik sendiri.⁴

Meskipun demikian, secara makro, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia justru menunjukkan peningkatan positif dari 70,90 pada tahun 2018 menjadi 76,47 pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan adanya kemajuan dalam aspek kerukunan sosial secara umum. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dialog epistemik antaragama di tingkat masyarakat. Banyak perdebatan di media sosial yang masih didominasi oleh bias kognitif, misinformasi, dan serangan emosional, sehingga ruang empati dan rasionalitas semakin terpinggirkan.⁵

Kesenjangan antara tingginya indeks kerukunan dan menurunnya kualitas dialog epistemik ini menjadi indikasi penting bahwa moderasi tidak cukup hanya didekati melalui aspek sikap sosial, tetapi juga perlu diperluas ke ranah epistemik yakni cara berpikir, menalar, dan berargumen secara moderat.

Dalam konteks ini menegaskan bahwa tantangan terbesar generasi muda saat ini bukan hanya menjaga toleransi sosial, tetapi juga membangun ketangguhan epistemik di tengah banjir informasi dan disinformasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan komunitas intelektual memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor epistemic moderation melalui penguatan cara berpikir kritis, analisis ilmiah, dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Tanpa kemampuan tersebut, mereka mudah terjebak dalam bias konfirmasi, generalisasi berlebihan, dan narasi populis yang justru memperkuat sekat

⁴Nasrun Nurhakim, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi, “Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia,” *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>.

⁵Agus Mulyono Rahmat Saehu, “Pemeliharaan Kerukunan Antarumat Beragama Di Provinsi Banten Berbasis Kearifan Lokal,” *Sino-Vatican Relations* 1 (2020): 19–36, <https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm131.8>.

identitas.⁶

Dunia kampus idealnya menjadi laboratorium kebudayaan dialogis tempat di mana gagasan lintas agama, nilai, dan pandangan dunia dapat dipertemukan dalam suasana saling menghargai. Namun dalam praktiknya, ruang akademik sering kali tidak sepenuhnya terbebas dari pengaruh ideologis yang menutup kemungkinan pertukaran gagasan yang sehat. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi fungsi kampus sebagai ruang produksi nalar moderat, bukan sekadar tempat transfer pengetahuan.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan untuk menjawab krisis tersebut adalah Epistemic Moderation. Konsep ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara rasio, moralitas, dan spiritualitas dalam proses pencarian kebenaran. Epistemic Moderation tidak berhenti pada tataran sosial, melainkan menembus dimensi epistemik, yaitu bagaimana manusia menilai, memverifikasi, dan mengomunikasikan kebenaran dengan cara yang adil dan reflektif.

Dalam perspektif Islam, pendekatan ini sejalan dengan prinsip wasathiyah yang menekankan sikap pertengahan dan keadilan berpikir. Sementara itu, dalam filsafat modern, prinsip moderasi epistemik berhubungan erat dengan rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas, konsep overlapping consensus John Rawls, dan gagasan rasionalitas tradisional Alasdair MacIntyre yang menekankan pentingnya konteks moral dan historis dalam membentuk pengetahuan pengetahuan.⁷

Melalui penguatan epistemic moderation, mahasiswa dan pemuda dapat menjadi penggerak harmoni sosial yang berlandaskan pada integritas intelektual dan keadilan berpikir. Paradigma ini tidak hanya penting dalam konteks keberagaman agama, tetapi juga relevan dalam membangun masyarakat yang rasional, toleran, dan berkeadaban di *era post-truth*.

⁶Ardita Sindy and Melikai Jihan El-Yunusi, “Mahasiswa Sebagai Agen Transformasi Dalam Pendidikan Perspektif Muhammad Iqbal,” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (2023): 53–67, <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.280>.

⁷Mahyuddin, Rustam Magun Pikahulan, and Muhammad Fajar, “KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan,” *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 5572, no. 11 (2018): 189–210.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami secara mendalam dinamika moderasi berpikir dalam konteks dialog lintas iman di era post-truth; 1.) bagaimana hubungan epistemic moderation dengan era post-truth? 2.) bagaimana dampak era post-truth terhadap kualitas dialog lintas iman di Indonesia? 3.) bagaimana strategi penerapan epistemic moderation dapat merekonstruksi pola dialog lintas iman yang rasional dan empatik?

Tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah di atas. Pertama, mendeskripsikan hubungan Epistemic Moderation dengan Era Post-Truth. Kedua, mengidentifikasi tantangan dialog lintas iman di era post-truth berdasarkan data sosial aktual, guna memahami faktor-faktor sosial dan kultural yang memperlemah kualitas dialog antarumat beragama. Ketiga, merumuskan strategi konseptual rekonstruksi dialog lintas iman berbasis epistemic moderation, yang berorientasi pada pembentukan kesadaran berpikir kritis, empatik, dan terbuka di kalangan mahasiswa serta generasi muda sebagai aktor sosial di ruang digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang moderasi beragama dengan memperkenalkan konsep epistemic moderation sebagai dimensi baru dalam studi keislaman dan filsafat ilmu. penelitian ini juga memiliki nilai guna dalam memperkuat budaya dialog yang rasional dan empatik di kalangan generasi muda Indonesia, sehingga mereka mampu menjadi agen moderasi yang menjaga harmoni di tengah pluralitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat filosofis-reflektif. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan mengkaji konstruksi konseptual Epistemic Moderation dalam konteks rekonstruksi dialog lintas iman di era post-truth.⁸

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan hermeneutik, yakni dengan

⁸Sherel Jeevan Mendoza, "A . Macintyre ' S Views On Animal Rationality : A Response To The Relativist Challenge," *DISKURSUS Jurnal Filsafat Dan Teologi* 19, no. Filsafat dan Teologi (2023): 163–80, <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/439>.

menafsirkan gagasan-gagasan rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas, overlapping consensus John Rawls, serta rasionalitas tradisional Alasdair MacIntyre, kemudian mengintegrasikannya dengan prinsip wasathiyah dalam Islam.

Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur primer dan sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema rasionalitas, moderasi, dan dialog lintas iman. Data dianalisis menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif, guna menemukan titik temu antara epistemologi Barat dan nilai-nilai keislaman. Dengan metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan sintesis teoretis yang mampu menjelaskan relevansi Epistemic Moderation sebagai paradigma alternatif dalam menghadapi krisis rasionalitas publik dan disinformasi keagamaan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan *Epistemic Moderation* dengan *Era Post-Truth*

Era post-truth memberikan perubahan besar dalam lanskap komunikasi dan produksi pengetahuan manusia modern. Istilah ini menggambarkan suatu kondisi di mana emosi dan opini pribadi lebih berpengaruh dibandingkan fakta objektif dalam membentuk pandangan masyarakat. Di ruang publik, kebenaran tidak lagi dipandang sebagai hasil dari proses penalaran rasional dan bukti empiris, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh narasi dominan dan kepentingan politik. Objektivitas dan integritas epistemik semakin tergerus oleh disinformasi dan bias konfirmasi, terutama melalui media digital yang memperkuat polarisasi dan menumbuhkan ilusi kebenaran. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai krisis epistemik, yaitu hilangnya kemampuan masyarakat untuk membedakan antara pengetahuan yang sahih dan klaim yang bersifat manipulatif.⁹

Habermas, melalui teori rasionalitas komunikatif, menyoroti bahwa rasionalitas publik idealnya dibangun di atas proses komunikasi yang terbuka dan argumentatif. Namun, dalam era post-truth, prinsip ini mengalami distorsi. Ruang publik yang seharusnya

⁹Chair and Adzfar, "Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah."

menjadi arena dialog rasional berubah menjadi medan perdebatan emosional yang didorong oleh kepentingan dan identitas kelompok. Rasionalitas yang berorientasi pada pemahaman bersama (mutual understanding) digantikan oleh rasionalitas strategis yang berfokus pada kemenangan opini. Dalam situasi seperti ini, dialog lintas iman turut terdampak: nilai-nilai kebenaran menjadi relatif, dan keinginan untuk memahami yang lain digantikan oleh dorongan untuk menegaskan diri. Akibatnya, semangat kerukunan dan saling pengertian yang menjadi inti dari dialog lintas iman perlahan tereduksi.¹⁰

Epistemic Moderation hadir sebagai respons atas krisis rasionalitas tersebut. Konsep ini mengandaikan bahwa moderasi bukan hanya persoalan sikap sosial, tetapi juga cara berpikir yang adil dan proporsional terhadap kebenaran. Dalam kerangka ini, rasionalitas tidak boleh dilepaskan dari etika, dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab moral. Epistemic Moderation menuntut setiap individu untuk menyeimbangkan antara nalar kritis dan kebijaksanaan batin dalam memahami realitas. Ia menjadi paradigma yang menolak dua ekstrem sekaligus: absolutisme rasional yang kaku, dan relativisme emosional yang tanpa arah.

Dalam tradisi Islam, konsep wasathiyah memiliki makna yang sejalan dengan semangat moderasi epistemik. Wasathiyah tidak hanya dipahami sebagai sikap pertengahan dalam beragama, melainkan juga keseimbangan dalam berpikir dan menilai kebenaran. Islam mendorong penggunaan akal ('aql) sebagai anugerah Tuhan untuk menuntun manusia pada kebenaran yang tidak hanya rasional, tetapi juga etis dan spiritual. Prinsip ini menegaskan bahwa kebenaran harus dicapai melalui argumentasi yang adil, sikap terbuka terhadap perbedaan, dan kesediaan untuk mengakui keterbatasan manusia dalam memahami realitas ilahi. Karena itu, Epistemic Moderation dapat dipandang sebagai aktualisasi modern dari nilai wasathiyah dalam konteks krisis kebenaran global yang dihadapi umat manusia saat ini.¹¹

¹⁰Trio Kurniawan, "Banalitas Kebohongan Manusia Era Post-Truth. Sebuah Rekonstruksi Nalar Dengan Analisis Kritis Mary Douglas DanJürgen Habermas," *Perspektif* 13, no. 2 (2021): 95–111, <https://doi.org/10.69621/jpf.v13i2.107>.

¹¹Muslimin Muslimin and Muhammad Ihyaul Fikro, "Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Santri," *Edukais : Jurnal Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.61595/edukais.2021.5.1.1-12>.

Integrasi antara teori rational communicative action dari Habermas dan nilai wasathiyah Islam memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi pengembangan Epistemic Moderation. Habermas menekankan bahwa komunikasi yang rasional menuntut keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan untuk mendengarkan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan dan kejujuran sebagai inti dari setiap bentuk interaksi sosial. Dengan menggabungkan keduanya, Epistemic Moderation tidak hanya menjadi teori sosial, tetapi juga etika epistemik yang memadukan dimensi rasional dan spiritual. Ia mengajarkan bahwa dialog, termasuk dialog lintas iman, hanya dapat mencapai pemahaman sejati apabila dilakukan dalam semangat keadilan epistemik dan empati intelektual.¹²

Hubungan antara Epistemic Moderation dan era post-truth dapat dipahami secara dialektis. Jika post-truth melambangkan era krisis kebenaran dan degradasi rasionalitas publik, maka Epistemic Moderation menawarkan paradigma penyeimbang untuk memulihkan integritas berpikir manusia. Melalui literasi epistemik, masyarakat diajak untuk kembali menilai informasi secara kritis, membedakan opini dari fakta, dan membangun kesadaran moral dalam proses pengetahuan. Sementara melalui empati komunikatif, mereka dilatih untuk mendengar dengan hati dan berpikir dengan nalar. Dengan dua pilar inilah Epistemic Moderation dapat berfungsi sebagai strategi rekonstruktif yang menghidupkan kembali rasionalitas publik dan membuka jalan bagi dialog lintas iman yang lebih adil, reflektif, dan beradab.

Dampak Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan

Fenomena post-truth telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan kebenaran, terutama di ranah sosial dan digital. Arus informasi yang begitu deras melalui media sosial menciptakan ruang komunikasi yang tidak lagi netral. Melalui mekanisme echo chamber dan filter bubble, pengguna hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri. Kondisi ini memicu polarisasi

¹²Khoirul Umam, Muh. Wasith Achadi, and Muhammad Asy'ari, "Pendekatan Pedagogis Integratif Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Islam Wasathiyah," *Perada* 7, no. 2 (2024): 107–25, <https://doi.org/10.35961/perada.v7i2.1631>.

identitas dan mempersempit ruang dialog lintas iman yang sejati. Disinformasi keagamaan semakin mudah menyebar, sering kali disertai dengan sentimen emosional yang memperuncing perbedaan. Akibatnya, dialog antariman kehilangan sifat autentiknya sebagai ruang saling belajar dan berubah menjadi arena pemberian diri serta penguatan ideologis kelompok masing-masing.¹³

Krisis komunikasi tersebut juga terlihat dari berbagai temuan empiris. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash Data & Democracy Research Hub pada tahun 2024, menunjukkan bahwa 18,15% konten video politik di lima provinsi penyelenggara Pilkada mengandung ujaran kebencian berbasis agama.¹⁴ Penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 63,07% guru di Indonesia memiliki opini intoleran terhadap pengikut agama lain.¹⁵

Meskipun data Kementerian Agama tahun 2024, menunjukkan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), hal tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dialog lintas iman. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa toleransi sosial belum sepenuhnya berakar pada kesadaran epistemik dan rasionalitas publik, melainkan masih bersifat normatif dan emosional.¹⁶

Fenomena ini menggambarkan kegagalan struktur rasionalitas publik sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Dalam konteks post-truth, ruang publik (public sphere) kehilangan fungsinya sebagai arena diskursus rasional dan berubah menjadi ruang produksi opini yang sarat kepentingan. Kebenaran tidak lagi lahir dari argumentasi komunikatif, melainkan dari popularitas narasi dan otoritas digital. John Rawls menambahkan, situasi ini menghambat terciptanya overlapping consensus, yakni

¹³Herman Purba and Fitzgerald Kennedy Sitorus, “Truth , Post Truth , Dan Dinamikanya Di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur” 10, no. 1 (2023): 1–16.

¹⁴Yosua Christian Lumban Tobing, “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia,” *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 (2024): 274–83, <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7891>.

¹⁵Nurhakim, Adriansyah, and Dewi, “Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia.”

¹⁶Rahmat Saehu, “Pemeliharaan Kerukunan Antarumat Beragama Di Provinsi Banten Berbasis Kearifan Lokal.”

kesepahaman rasional yang melampaui batas identitas agama atau moral partikular.¹⁷ Sementara itu, Alasdair MacIntyre melihat fenomena tersebut sebagai akibat dari hilangnya akar tradisi moral yang dahulu menopang rasionalitas komunitas. Masyarakat modern, menurutnya, terjebak dalam fragmentasi nilai yang menyebabkan disorientasi epistemik: kebenaran menjadi terputus dari konteks moral dan sosialnya.¹⁸

Dari ketiga kerangka teori tersebut dapat disimpulkan bahwa krisis dialog lintas iman di era post-truth tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga epistemik. Moderasi yang selama ini dipahami sebatas pada tataran perilaku sosial ternyata belum cukup untuk memulihkan kerusakan pada level rasionalitas publik. Karena itu, diperlukan pendekatan baru yang menyentuh dimensi cara berpikir suatu bentuk moderasi epistemik yang memulihkan integritas pengetahuan dan komunikasi. Epistemic Moderation hadir untuk menata kembali orientasi dialog lintas iman agar tidak terjebak dalam relativisme atau absolutisme, melainkan berakar pada kesadaran rasional yang adil, terbuka, dan empatik. Paradigma inilah yang menjadi dasar bagi upaya rekonstruksi dialog lintas iman di tengah krisis kebenaran global.

Strategi Penerapan *Epistemic Moderation* untuk Rekonstruksi Dialog Linta

Dalam konteks era post-truth yang sarat dengan disinformasi dan polarisasi, penerapan Epistemic Moderation menjadi langkah strategis untuk memulihkan kualitas dialog lintas iman. Konsep ini tidak sekadar menawarkan cara berpikir kritis, tetapi juga menanamkan kesadaran etis dalam menilai dan mengomunikasikan kebenaran. Penerapannya berlandaskan pada tiga prinsip utama, yakni epistemic humility, integrasi antara data, pengalaman, dan nilai, serta penolakan terhadap absolutisme epistemik. Ketiganya saling berhubungan dan membentuk fondasi bagi cara berpikir yang moderat, reflektif, dan terbuka terhadap pluralitas pengetahuan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, dialog lintas iman dapat berkembang menjadi ruang pertukaran makna yang rasional

¹⁷Otto Gusti Ndegong Madung, “Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya,” *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 18, no. 2 (2022): 218–37, <https://doi.org/10.36383/diskursus.v18i2.327>.

¹⁸M. Ahmet, “Rasyonel Ahlak Geleneğinin Tarihselci Bir Yorumu Olarak MacIntyre’in Erdem Etiği,” *Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi* 21, no. 2 (2022): 495–516, <https://doi.org/10.20981/kaygi.1111103>.

sekaligus bermoral.

Prinsip pertama, Epistemic Humility atau kerendahan hati epistemik, menekankan kesadaran akan keterbatasan pengetahuan manusia. Dalam tradisi Islam, nilai ini sejalan dengan konsep wasathiyah, yaitu keseimbangan dan sikap tidak berlebih-lebihan dalam memandang diri dan orang lain. Kesadaran bahwa kebenaran manusia bersifat parsial mendorong individu untuk lebih mendengarkan, memahami, dan belajar dari perspektif lain. Dalam konteks dialog lintas iman, sikap ini menjadi dasar empati intelektual: seseorang tidak berusaha mendominasi kebenaran, melainkan membuka ruang untuk kemungkinan kebenaran yang lebih luas.¹⁹

Prinsip kedua adalah integrasi antara data, pengalaman, dan nilai. Dalam kerangka Epistemic Moderation, pengetahuan tidak hanya dihasilkan dari proses rasional semata, tetapi juga melalui pengalaman sosial dan nilai-nilai moral yang membentuknya. Di sini, gagasan Jürgen Habermas tentang rational communicative action menjadi relevan. Habermas menegaskan bahwa rasionalitas sejati hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang jujur, inklusif, dan bebas dari dominasi. Integrasi ini juga sejalan dengan pandangan Islam bahwa pengetahuan yang sejati harus menyatukan antara akal ('aql), pengalaman (tajribah), dan nilai ilahiah (akhlaq). Dengan mengharmonikan ketiganya, dialog lintas iman dapat menjadi sarana pertukaran kebenaran yang tidak hanya argumentatif, tetapi juga sarat makna kemanusiaan dan spiritual.²⁰

Prinsip ketiga, penolakan terhadap absolutisme epistemik, menegaskan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas kebenaran. John Rawls, melalui konsep overlapping consensus, menunjukkan bahwa masyarakat plural hanya dapat hidup damai apabila setiap kelompok bersedia menemukan titik temu rasional tanpa menghapus keyakinan partikularnya.²¹ Dalam konteks yang sama, Alasdair MacIntyre berpendapat bahwa rasionalitas selalu berakar pada tradisi tertentu, sehingga dialog hanya mungkin terjadi bila

¹⁹Hermeilia Megawati, "Menjadi Masyarakat Digital Yang Berkerendahan Hati Intelektual" 11, no. April (2022): 1–2.

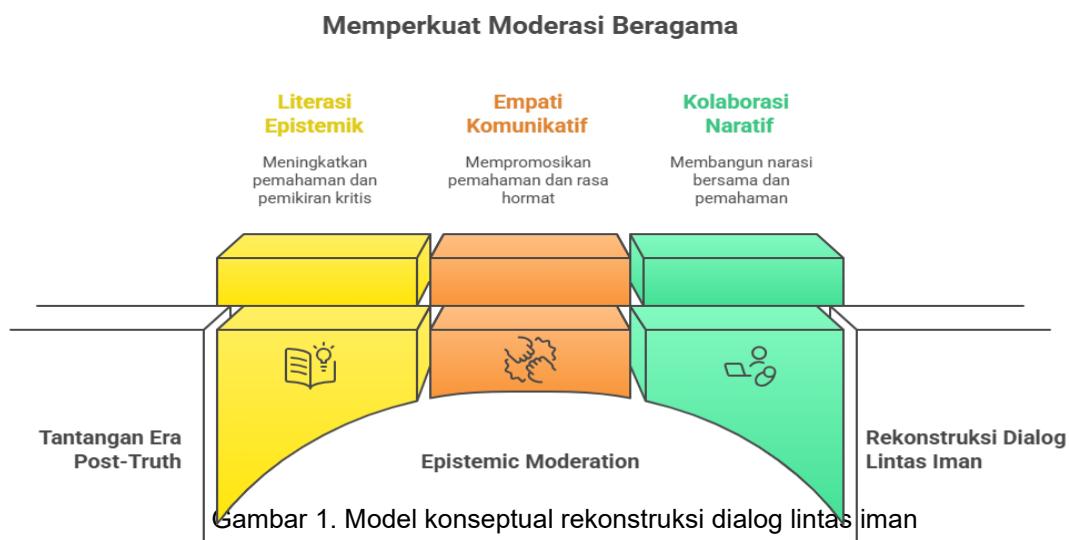
²⁰Dimas Rahman Rizqian, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas," *Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.62630/elhamra.v8i2.121>.

²¹(Sunaryo, 2022)

setiap tradisi mau membuka diri terhadap kritik dan pembelajaran lintas batas.²²

Model konseptual rekonstruksi dialog lintas iman

Model konseptual rekonstruksi dialog lintas iman berbasis epistemic moderation dibangun sebagai kerangka berpikir dan bertindak yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis, empati komunikatif, dan kolaborasi kemanusiaan. Berikut digambar krangka berpikir:



Dalam konteks sosial-keagamaan kontemporer, dialog lintas iman tidak cukup berhenti pada tataran toleransi pasif, tetapi harus ditransformasikan menjadi proses belajar bersama yang melibatkan dimensi epistemik dan etis. Model ini dioperasionalkan melalui tiga tahap integratif, yaitu literasi epistemik, empati komunikatif, dan kolaborasi naratif.

Literasi Epistemik

Tahap awal dalam rekonstruksi dialog lintas iman adalah membangun literasi epistemik, yakni kemampuan memahami cara berpikir kritis, rasional, dan berbasis bukti. Literasi epistemik menuntut setiap individu untuk mengenali sumber-sumber pengetahuan, menilai keabsahan argumen, serta membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi

²²Hendrawan Wijoyo, "Persahabatan: Sumbangsih Moralitas Tradisi Kristen Bagi Moralitas Bangsa Indonesia," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 16, no. 2 (2017): 169–82, <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.17>.

informasi. Dalam konteks moderasi beragama, literasi epistemik berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pemahaman keagamaan selalu berada dalam konteks sejarah, budaya, dan bahasa tertentu. Kebenaran tidak lagi dilihat secara eksklusif, melainkan sebagai hasil dialog antara wahyu, akal, dan pengalaman manusia. Upaya ini menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat beragama yang cerdas secara intelektual dan bijak dalam menanggapi perbedaan pandangan.²³

Empati Komunikatif

Tahap kedua menekankan pentingnya empati komunikatif sebagai kemampuan untuk mendengar secara aktif dan memahami perspektif orang lain tanpa prasangka. Empati komunikatif tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional, tetapi juga melibatkan kesadaran etis bahwa setiap pandangan memiliki konteks epistemik yang harus dihormati. Dalam praktiknya, tahap ini mendorong terjadinya transformasi dari monolog ke dialog dari berbicara untuk memenangkan argumen menjadi berbicara untuk memahami dan membangun kesepahaman. Nilai-nilai seperti *husn al-żann* (prasangka baik), *ta‘āruf* (saling mengenal), dan ‘adl (keadilan) menjadi prinsip moral yang menopang interaksi lintas iman agar tetap berada dalam koridor keadaban dan penghargaan terhadap kemanusiaan universal.²⁴

Kolaborasi Naratif

Tahap puncak dari model konseptual ini adalah kolaborasi naratif, yaitu proses membangun narasi bersama tentang nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas agama, suku, dan ideologi. Kolaborasi naratif bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi merupakan upaya kolektif untuk membentuk makna dan tujuan bersama. Dalam konteks epistemic moderation, narasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga epistemologis yakni narasi yang mendidik publik untuk berpikir rasional, menghargai data, dan mengutamakan keadilan pengetahuan (*epistemic justice*). Kolaborasi ini dapat

²³Mohammad Irham Akbar and Mohammad Rezza Fahlevvi, “Cegah Penyebaran Misinformasi Di Media Sosial Menggunakan Peralatan Dan Fitur Literasi Digital,” *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua* 1, no. 1 (2023): 15–20, <https://doi.org/10.61124/1.renata.2>.

²⁴Rizqian, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas.”

diwujudkan melalui proyek lintas iman, penelitian kolaboratif, atau kegiatan sosial yang menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan adalah milik bersama semua tradisi agama.²⁵

Ketiga tahap tersebut selaras dengan gagasan Habermas mengenai komunikasi intersubjektif sebagai sarana mencapai konsensus rasional. Dalam pandangan Habermas, konsensus bukan berarti keseragaman, melainkan hasil dari proses dialog yang terbuka dan saling menghormati. Dengan menerapkan kerangka Epistemic Moderation, dialog lintas iman dapat bergerak melampaui perdebatan dogmatis menuju pencarian makna bersama. Proses ini bukan hanya menghidupkan kembali fungsi rasionalitas publik, tetapi juga memperkuat tatanan moral masyarakat yang plural. Epistemic Moderation berfungsi ganda yaitu sebagai pendekatan teoretis yang mengembalikan nilai rasionalitas dan sebagai strategi praktis yang membentuk ekosistem dialog yang adil, empatik, dan berkeadaban.

Penerapan epistemic moderation dalam konteks pendidikan dan ruang digital menjadi langkah strategis dalam membangun generasi muda yang kritis, empatik, dan rasional dalam memahami keberagaman. Pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan dan umum, memiliki peran sentral dalam menanamkan paradigma berpikir moderat melalui proses pembelajaran yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan, nilai moral, dan kecerdasan digital.

Epistemic Moderation memiliki implikasi luas terhadap kehidupan sosial-religius, terutama dalam membentuk budaya berpikir dan berinteraksi yang lebih rasional, empatik, dan berkeadaban. Dalam bidang pendidikan, prinsip moderasi epistemik mendorong lahirnya pembelajaran yang menumbuhkan critical thinking sekaligus kesadaran spiritual, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga adil dalam menilai perbedaan.

Dalam ranah komunikasi publik, Epistemic Moderation menjadi landasan etika baru yang menuntun masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi serta lebih terbuka terhadap dialog lintas iman dan pandangan yang berbeda. Sedangkan dalam

²⁵Ahmet, “Rasyonel Ahlak Geleneğinin Tarihselci Bir Yorumu Olarak MacIntyre’ın Erdem Etiği.”

konteks kehidupan keagamaan, pendekatan ini memperkuat praktik wasathiyah Islam sebagai model beragama yang tidak ekstrem, toleran, dan berbasis ilmu pengetahuan. Epistemic Moderation tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga sebuah paradigma praksis yang dapat menumbuhkan harmoni sosial dan memperdalam kesadaran keagamaan di tengah masyarakat yang semakin majemuk.

Meskipun Epistemic Moderation menawarkan paradigma yang menjanjikan bagi pembaruan cara berpikir dan berdialog dalam masyarakat majemuk, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Pada tataran kultural, resistensi terhadap perubahan pola pikir kritis sering kali muncul akibat fanatisme keagamaan dan bias ideologis yang menghambat keterbukaan terhadap pandangan lain. Narasi populis yang menolak refleksi rasional turut memperkuat kecenderungan tersebut, menjadikan ruang publik sarat emosi daripada argumentasi.

Dari sisi institusional, masih minimnya kurikulum yang menumbuhkan literasi epistemik serta terbatasnya ruang dialog interdisipliner di lembaga pendidikan dan keagamaan menyebabkan nilai moderasi berpikir sulit diinternalisasi secara sistemik. Sementara itu, tantangan epistemologis muncul dalam bentuk krisis otoritas keilmuan di era digital, di mana banjir informasi menciptakan otoritas semu dan menggantikan refleksi filosofis dengan logika pragmatis yang dangkal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan Epistemic Moderation tidak dapat dicapai secara instan, tetapi menuntut upaya kolektif untuk membangun ekosistem berpikir yang rasional, adil, dan berakar pada nilai-nilai moral yang universal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Epistemic Moderation* merupakan paradigma berpikir yang memadukan rasionalitas dan spiritualitas dalam memahami kebenaran. Konsep ini berakar pada nilai wasathiyah Islam dan memiliki kesesuaian dengan teori rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas, overlapping consensus John Rawls, serta etika tradisi Alasdair MacIntyre. Melalui sintesis tersebut, Epistemic

Moderation menegaskan bahwa pencarian kebenaran menuntut keseimbangan antara keyakinan dan keterbukaan rasional terhadap pandangan lain.

Dalam konteks era post-truth yang ditandai oleh dominasi opini, disinformasi, dan polarisasi keagamaan, temuan ini menegaskan pentingnya Epistemic Moderation sebagai dasar penguatan rasionalitas publik. Paradigma ini berperan mengembalikan dialog lintas iman pada prinsip nalar, empati, dan keadilan epistemik agar wacana keagamaan tidak terjebak dalam emosi dan prasangka, tetapi berorientasi pada pencarian makna bersama.

Penerapan Epistemic Moderation dapat diwujudkan melalui tiga strategi utama: penguatan literasi epistemik untuk menumbuhkan daya kritis terhadap informasi, pengembangan empati komunikatif untuk memahami perspektif keagamaan lain, serta pembentukan kolaborasi naratif sebagai ruang kerja sama lintas iman. Ketiga strategi ini saling melengkapi dalam membangun ekosistem dialog yang setara, terbuka, dan inklusif.

Sebagai arah pengembangan selanjutnya, konsep ini perlu diuji secara empiris di lingkungan pendidikan dan komunitas lintas iman guna menilai efektivitasnya dalam memperkuat rasionalitas dan moral publik. Dengan penerapan yang berkelanjutan, Epistemic Moderation berpotensi menjadi model baru penguatan moderasi beragama dan pembangunan dialog lintas iman yang relevan dengan tantangan era post-truth.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmet, M. "Rasyonel Ahlak Geleneğinin Tarihselci Bir Yorumu Olarak MacIntyre'in Erdem Etiği." *Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi* 21, no. 2 (2022): 495–516. <https://doi.org/10.20981/kaygi.1111103>.
- Ardita Sindy, and Melikai Jihan El-Yunusi. "Mahasiswa Sebagai Agen Transformasi Dalam Pendidikan Perspektif Muhammad Iqbal." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (2023): 53–67. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.280>.
- Chair, Badrul Munir, and Zainul Adzfar. "Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah." *Fikrah* 9, no. 2 (2021): 265. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v9i2.12596>.
- Gusti Ndegong Madung, Otto. "Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural Dan Kritik Atasnya." *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara* 18, no. 2 (2022): 218–37. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v18i2.327>.
- Irham Akbar, Mohammad, and Mohammad Rezza Fahlevvi. "Cegah Penyebaran Misinformasi Di Media Sosial Menggunakan Peralatan Dan Fitur Literasi Digital." *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua* 1, no. 1 (2023): 15–20. <https://doi.org/10.61124/1.renata.2>.
- Jeevan Mendosa, Sherel. "A . Macintyre ' S Views On Animal Rationality : A Response To The Relativist Challenge." *DISKURSUS Jurnal Filsafat Dan Teologi* 19, no. Filsafat dan Teologi (2023): 163–80. <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/439>.
- Kurniawan, Trio. "Banalitas Kebohongan Manusia Era Post-Truth. Sebuah Rekonstruksi Nalar Dengan Analisis Kritis Mary Douglas DanJürgen Habermas." *Perspektif* 13, no. 2 (2021): 95–111. <https://doi.org/10.69621/jpf.v13i2.107>.
- Mahyuddin, Rustam Magun Pikahulan, and Muhammad Fajar. "KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan." *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 5572, no. 11 (2018): 189–210.
- Megawati, Hermeilia. "Menjadi Masyarakat Digital Yang Berkerendahan Hati Intelektual" 11, no. April (2022): 1–2.
- Muslimin, Muslimin, and Muhammad Ihyaul Fikro. "Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Santri." *Edukais : Jurnal Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.61595/edukais.2021.5.1.1-12>.
- Nurhakim, Nasrun, Muhamad Irfan Adriansyah, and Dinnie Anggraeni Dewi. "Intoleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 50–61. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126>.
- Purba, Herman, and Fitzgerald Kennedy Sitorus. "Truth , Post Truth , Dan Dinamikanya Di Indonesia : Sebuah Kajian Literatur" 10, no. 1 (2023): 1–16.
- Rahmat Saehu, Agus Mulyono. "Pemeliharaan Kerukunan Antarumat Beragama Di Provinsi Banten Berbasis Kearifan Lokal." *Sino-Vatican Relations* 1 (2020): 19–36. <https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm131.8>.

- Rizqian, Dimas Rahman. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jurgen Habermas." *Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 8, no. 2 (2023): 1–21. <https://doi.org/10.62630/elhamra.v8i2.121>.
- Sunaryo, Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Tobing, Yosua Christian Lumban. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 02 (2024): 274–83. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7891>.
- Umam, Khoirul, Muh. Wasith Achadi, and Muhammad Asy'ari. "Pendekatan Pedagogis Integratif Dalam Pengembangan Nilai-Nilai Islam Wasathiyah." *Perada* 7, no. 2 (2024): 107–25. <https://doi.org/10.35961/perada.v7i2.1631>.
- Wijoyo, Hendrawan. "Persahabatan: Sumbangsih Moralitas Tradisi Kristen Bagi Moralitas Bangsa Indonesia." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 16, no. 2 (2017): 169–82. <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.17>.
- Yaqin, Haqqul. "Keimanan Rasional Dan Genius Spiritual: Upaya Mencari Titik Temu Kredo Agama Dan Sains." *Maarif* 15, no. 1 (2020): 153–67. <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i1.82>.